

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuannya masing-masing, namun tujuan perusahaan tentunya yang paling utama adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan tersebut (Rachmad dan Muid, 2013). Keuntungan perusahaan bisa didapatkan melalui kegiatan operasional. Kegiatan operasional perusahaan tentunya tidak dapat berjalan apabila tidak terdapat modal, oleh karena itu perusahaan membutuhkan pihak eksternal untuk mendukung kegiatan operasional tersebut. Pihak eksternal yang dimaksud adalah kreditor dan investor yang mana kreditor dan investor tersebut nantinya mengharapkan *feed back* dari perusahaan, dimana *feed back* tersebut berupa dividen yang tinggi (Rachmad dan Muid 2013).

Pembayaran dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tergantung dari keputusan manajemen dalam menentukan laba bersih yang diperoleh perusahaan, dimana keputusan manajemen tersebut akan menghasilkan sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan dividen (Nurwani, 2018). Kebijakan dividen dibuat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mengundang seluruh pemegang saham. Pemegang saham mayoritas atau dengan kepemilikan saham lebih dari 50% biasanya akan mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan dividen. Kemudian jika sudah ditetapkan prosentase pembagian dividen untuk para pemegang saham, pembagian dividen akan dilakukan beberapa minggu

setelah pengumuman. Kebijakan dividen itu sendiri merupakan keputusan yang berkaitan dengan penempatan laba, apakah laba yang dihasilkan akan dibagikan sebagai dividen ke para investor atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakan sebagai investasi perusahaan yang akan datang (Fauziah, 2017). Kebijakan dividen berisi sebuah keputusan apakah laba yang dihasilkan perusahaan pada suatu akhir periode akuntansi akan didistribusikan kepada para pemegang saham atau apakah laba tersebut akan kembali tersimpan oleh perusahaan sebagai salah satu sumber pendanaan investasi di masa yang akan datang (Wuisan dan Lukman, 2018). Kebijakan dividen juga merupakan salah satu keputusan penting yang berkaitan dengan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, rencana yang dimaksud adalah jumlah laba yang bersih yang akan dibagi dan jumlah laba bersih yang akan diinvestasikan kembali (Rachmad dan Muid, 2013).

Fenomena yang terjadi pada kebijakan dividen terjadi pada PT Wijaya Karya Tbk memperoleh laba bersih sebesar Rp 295,75 miliar yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan penjualan yang diperoleh dari kontrak baru di sektor konstruksi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 46 persen, kemudian akan membagikan dividen sebesar Rp 56,5 miliar. Dengan demikian perusahaan membuat suatu kebijakan yaitu akan membagikan dividen sebesar Rp 5,91 per lembar sahamnya kepada para pemegang saham, dan kebijakan tersebut sudah disetujui pada saat RUPS. Selain itu PT Bukit Asam Tbk membuat kebijakan yaitu akan membagikan dividen sebesar Rp 3,76 triliun atau setara dengan 75% dari total laba bersih buku tahun 2018 dengan dividen

per saham sebesar Rp 326,37. PT Bukit Asam Tbk tidak membagikan 100% total laba bersih karena 25% sisanya akan digunakan sebagai cadangan umum perusahaan dan sudah disetujui pada saat RUPS.

Fenomena yang lainnya berupa harga saham, laba bersih dan dividen per saham tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Nama perusahaan	Harga saham	Laba bersih	Dividen per saham
PTBA	4.300	5.020.000.000.000	318,5
TLKM	3.750	18.000.000.000.000	167,6
PTPP	2.640	1.958.993.000.000	46,8
JSMR	1.700	2.252.600.416.000	45,5
WIKA	1.655	935.753.763.000	38,6
WASKITA	1.605	4.600.000.000.000	72,9
ADHI	1.560	644.000.000.000	29
PJAA	1.260	220.218.637.478	52
TINS	755	502.000.000.000	23,6

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan dengan harga saham yang tinggi tentunya akan membagikan dividen yang tinggi pula kepada para pemegang saham. Dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan membagikan atau tidak membagikan dividen tergantung dari pendapatan yang didapat apakah tinggi atau rendah. Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan dimana keuntungan tersebut akan dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, yang artinya perusahaan dianggap telah memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham dan kepentingan pemegang saham juga telah terpenuhi (Rachmad dan Muid, 2013).

Kepentingan pemegang saham dan manajer perusahaan tentunya memiliki perbedaan. Pemegang saham nantinya akan menunjuk manajer untuk mengelola perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan

kesejahteraan pemegang saham, tetapi kewenangan yang dimiliki oleh manajer seringkali tidak digunakan untuk kepentingan pemegang saham melainkan untuk kepentingannya sendiri (Meilita dan Rokhmawati, 2017). Perbedaan kepentingan tersebut yang kemudian menimbulkan (*agency conflict*) konflik keagenan (Sari dan Budiasih, 2016).

Konflik keagenan (*agency conflict*) pada perusahaan dapat diminimalkan atau diperkecil dengan cara, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya-biaya yang kemudian disebut dengan (*agency cost*) biaya keagenan (Widiari dan Putra, 2017). Biaya keagenan (*agency cost*) juga akan muncul seiring dengan dilakukannya pengawasan. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi biaya keagenan (*agency cost*) yaitu dengan meningkatkan kepemilikan saham dengan cara menambah jumlah kepemilikan saham seperti kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham pemetintah, kepemilikan saham institusional dan kepemilikan saham asing (Meilita dan Rokhmawati, 2017). Kepemilikan saham tersebut juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan.

Faktor pertama adalah kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Hery, 2007). Kepemilikan manajerial bertujuan untuk mengawasi dan memonitor perilaku manajer serta dapat meminimalisir biaya pengawasan atau yang disebut biaya keagenan, cara yg dapat dilakukan yaitu dengan melibatkan manajer dalam kepemilikan saham agar dapat menyetarakan kepentingan manajer dan pemegang saham (Rais dan Santoso, 2017). Kesejajaran kepentingan antara pemegang saham dan pihak

manajerial yang ikut dalam kepemilikan saham juga dapat berpengaruh pada besarnya dividen yang dibayarkan (Sumartha, 2016). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan presentase kepemilikan manajerial yang besar akan membayarkan dividen dalam jumlah yang besar, sedangkan perusahaan dengan presentasi kepemilikan manajerial yang kecil akan cenderung menetapkan dividen dalam jumlah yang kecil (Rachmad dan Muid, 2013).

Penelitian yang terkait dengan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen telah banyak dilakukan diantaranya Rachmad dan Muid (2013), Jayanti dan Puspitasari (2017) & Wuisan dan Lukman (2018) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan Widiari dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sementara menurut Sutanto, dkk (2017) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan manajerial.

Faktor kedua adalah kepemilikan pemerintah merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Hunardy dan Tarigan, 2017). Perusahaan yang dikelola oleh kepemilikan pemerintah dengan presentase yang tinggi memilih laba yang dihasilkan oleh perusahaan sebagian besar dikelola kembali dalam bentuk saldo laba, dimana hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat struktur modal perusahaan guna menyediakan pelayanan bagi masyarakat sebagai karakteristik khusus dari perusahaan dengan kepemilikan pemerintah (Wuisan dan Lukman, 2018).

Penelitian yang terkait dengan pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kebijakan dividen telah banyak dilakukan diantaranya (Perwira dan Ratnaningsih, 2019) dan (Setiawan dkk, 2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sebaliknya menurut (Wuisan dan Lukman, 2018) dan (Ardiansyah dkk, 2018), menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sementara menurut (Anwar dkk, 2018) kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen,

Faktor ke tiga adalah kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *aset management* (Hery, 2014). Kepemilikan yang presentasinya paling besar dalam perusahaan biasanya adalah kepemilikan institusional (Nugraheni dan Mertha, 2019). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang tinggi pula dari pihak investor institusi sehingga sehingga dapat menekan perilaku *opportunistic* manajer dan dapat juga menurunkan konflik keagenan, disamping itu semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka akan berdampak baik juga bagi dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan (Fitriana dan Suzan, 2018). Bisa disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi memiliki masalah agensi yang relatif kecil, sehingga diharapkan untuk membagikan dividen dalam jumlah yang lebih kecil (Rachmad dan Muid, 2013).

Penelitian yang terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen telah banyak dilakukan diantaranya (Nugrahening dan

Mertha, 2019), (Sutanto dkk, 2017) dan (Kurniawan dkk, 2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sebaliknya menurut (Sumartha, 2016), (Fitria dan Suzan, 2018), (Lucyanda dan Lylia, 2012) serta (Widiari dan Putra, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sementara menurut (Rachmad dan Muid, 2013), (Jayanti dan Puspitasari, 2019) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen,

Faktor yang terakhir adalah kepemilikan asing. Menurut UU No.25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6, kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan yang dikendalikan oleh asing harus memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan memantau kegiatan-kegiatan perusahaan yang selanjutnya akan mengarah pada pembayaran dividen yang tinggi (Setiawan dkk, 2016). Oleh karena itu perusahaan dengan presentase kepemilikan asing yang tinggi maka akan diikuti oleh kecenderungan rasio pembayaran dividen yang semakin tinggi pula, sebaliknya jika perusahaan dengan presentase kepemilikan asing yang rendah maka akan diikuti oleh kecenderungan rasio pembayaran dividen yang rendah pula (Wuisan dan Lukman, 2018).

Penelitian yang terkait dengan pengaruh kepemilikan asing terhadap kebijakan dividen telah banyak dilakukan diantaranya (Wuisan dan Lukman, 2018) dan (Setiawan dkk, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen, sebaliknya menurut (Bangun

dkk, 2018) kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sementara menurut (Jayanti dan Puspitasari, 2017) dan (Lucyanda dan Lyliana, 2012) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wuisan dan Lukman, 2018) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap kebijakan dividen perusahaan. Perbedaan dari segi variabel, penelitian terdahulu menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti mengganti variabel kepemilikan keluarga dengan kepemilikan institusional. Alasan peneliti mengganti variabel yaitu selain ingin membedakan dengan penelitian terdahulu, karena kepemilikan institusional masih termasuk ke dalam struktur kepemilikan yang merupakan proksian dan *Corporate Governance*. Kemudian perusahaan dengan struktur kepemilikan institusional apabila dihubungkan dengan kebijakan dividen akan memiliki kecenderungan untuk memperoleh *capital again* yang artinya variabel kepemilikan institusional dapat berpengaruh terhadap kebijakan dividen perusahaan (Wuisan dan Lukman, 2018).

Perbedaan penelitian terdapat pada sampel yang digunakan, penelitian ini menggunakan perusahaan BUMN non keuangan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perusahaan non keuangan. Kemudian pada periode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan periode 2012-2016 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2012-2018. Alasan peneliti menggunakan perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena pada perusahaan tersebut terdapat kepemilikan pemerintah yang menjadi variabel pada

penelitian ini, disamping itu juga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan kepemilikan pemerintah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran dan bukti empiris tentang kebijakan dividen yang merupakan keputusan untuk menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan bagian yang akan ditahan oleh perusahaan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ? ★
2. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen ?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen?

C. Batas Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini hanya meneliti bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing yang mempengaruhi kebijakan dividen dengan tahun periode penelitian 2012-2018.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bukti empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.
2. Untuk menemukan bukti empiris apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.
3. Untuk menemukan bukti empiris apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.
4. Untuk menemukan bukti empiris apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan dividen, serta menjadi acuan dalam pembagian dividen kepada investor.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan kontribusi dalam ilmu akuntansi terutama dalam bidang akuntansi keuangan yang terkait dengan adanya kebijakan dividen pada suatu perusahaan.

3. Bagi Pihak Berkepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bisa memberikan manfaat berkaitan dengan struktur kepemilikan dan kebijakan dividen pada suatu perusahaan kepada pihak berkepentingan seperti investor, kreditor atau pihak lain.

